



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA



Profil Reformasi Birokrasi Ombudsman Republik Indonesia

2019



OMBUDSMAN
REPUBLIK INDONESIA

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA



Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan,
Jakarta Selatan 12920



(021) 2251 3737



www.ombudsman.go.id



Ombudsman RI



Ombudsman Republik Indonesia



@Ombudsmanri137



@OmbudsmanRI137



PROFIL REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019

SISTEMATIKA

I Kerangka dan
Tata Kelola
Ombudsman RI

III Kesimpulan Profil
Reformasi Birokrasi
dan Perbaikan
Berkelanjutan Per
Area Perubahan

II Capaian
Per Area
Perubahan

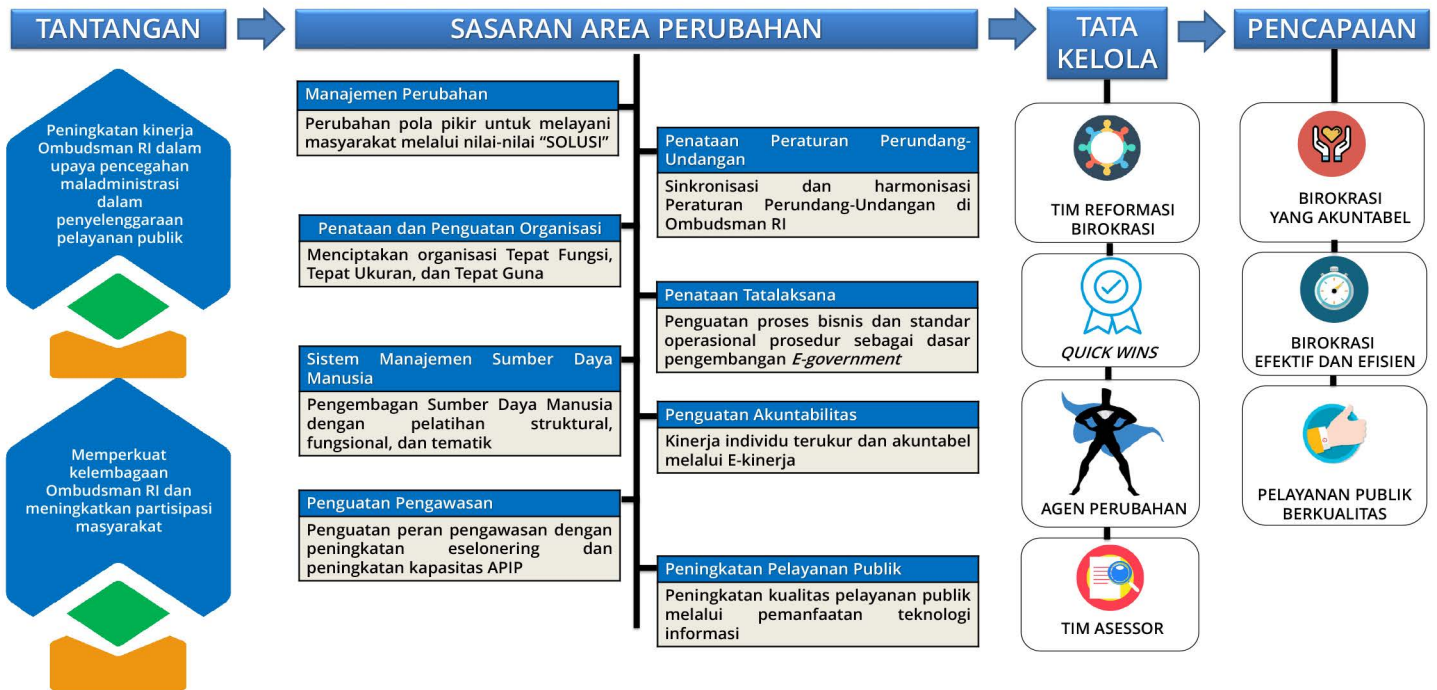
IV Kesimpulan
Tindak Lanjut
Evaluasi
Reformasi
Birokrasi Tahun
2018



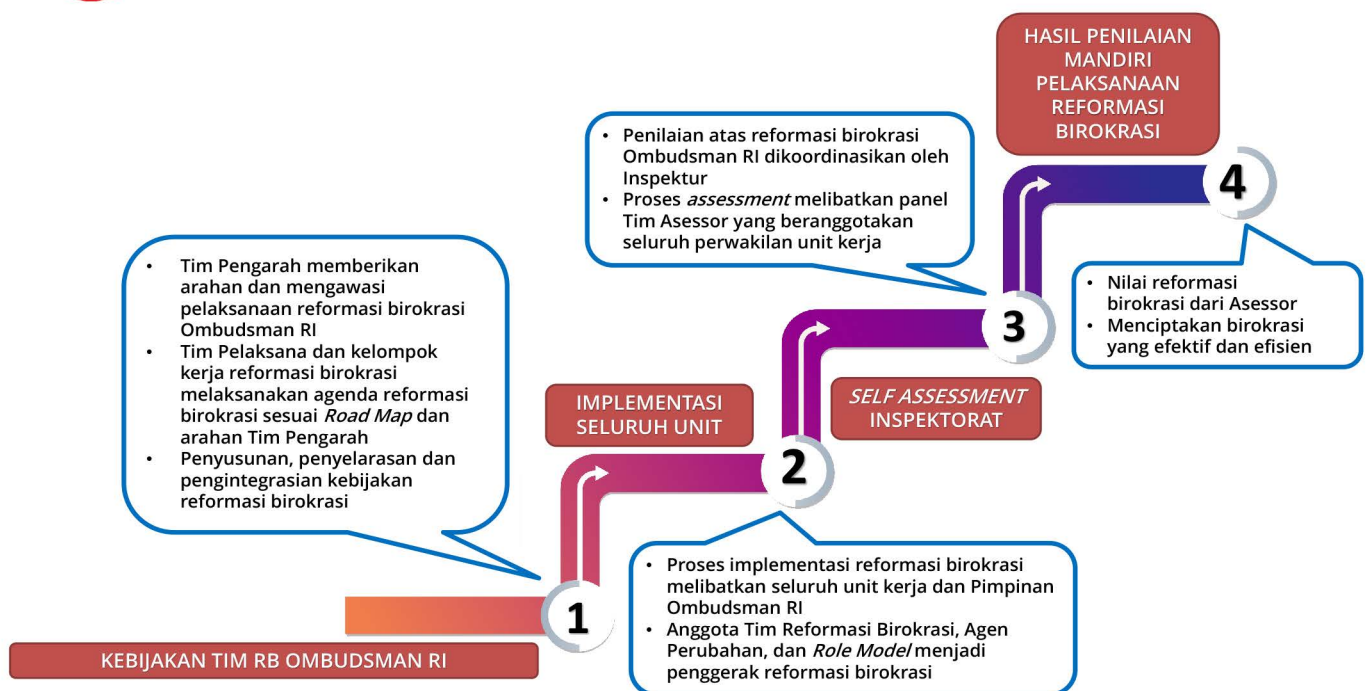
KERANGKA DAN TATA KELOLA OMBUDSMAN RI



KERANGKA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI



TATA KELOLA REFORMASI BIROKRASI INTERNAL



TIM EVALUATOR DARI KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

II

CAPAIAN PER AREA PERUBAHAN

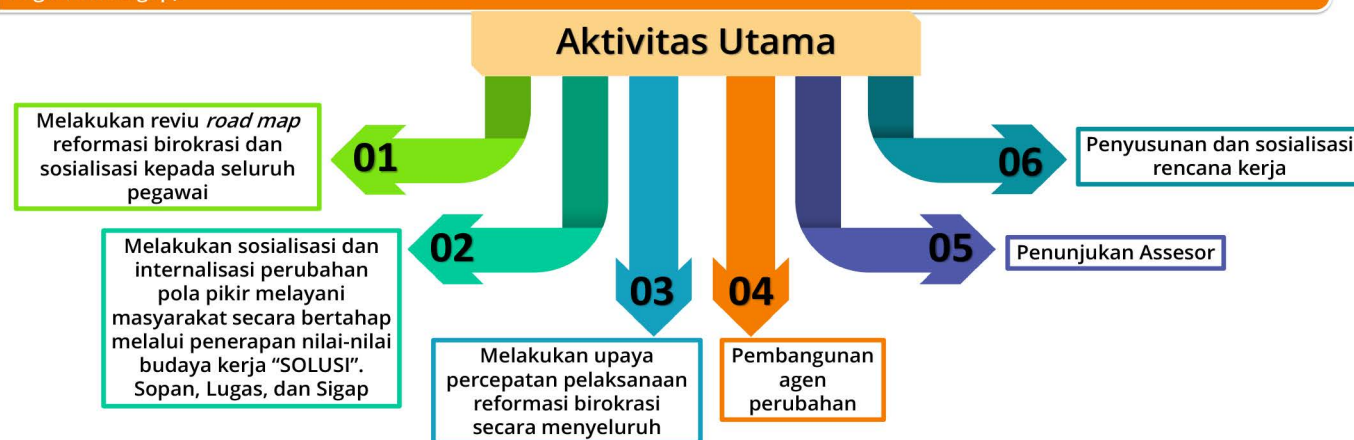
A CAPAIAN - MANAJEMEN PERUBAHAN

1 RENCANA KERJA

MANAJEMEN PERUBAHAN

SASARAN STRATEGIS:

Terjadinya perubahan pola pikir melayani masyarakat secara bertahap melalui penerapan nilai-nilai budaya kerja "SOLUSI" (Sopan, Lugas, dan Sigap).

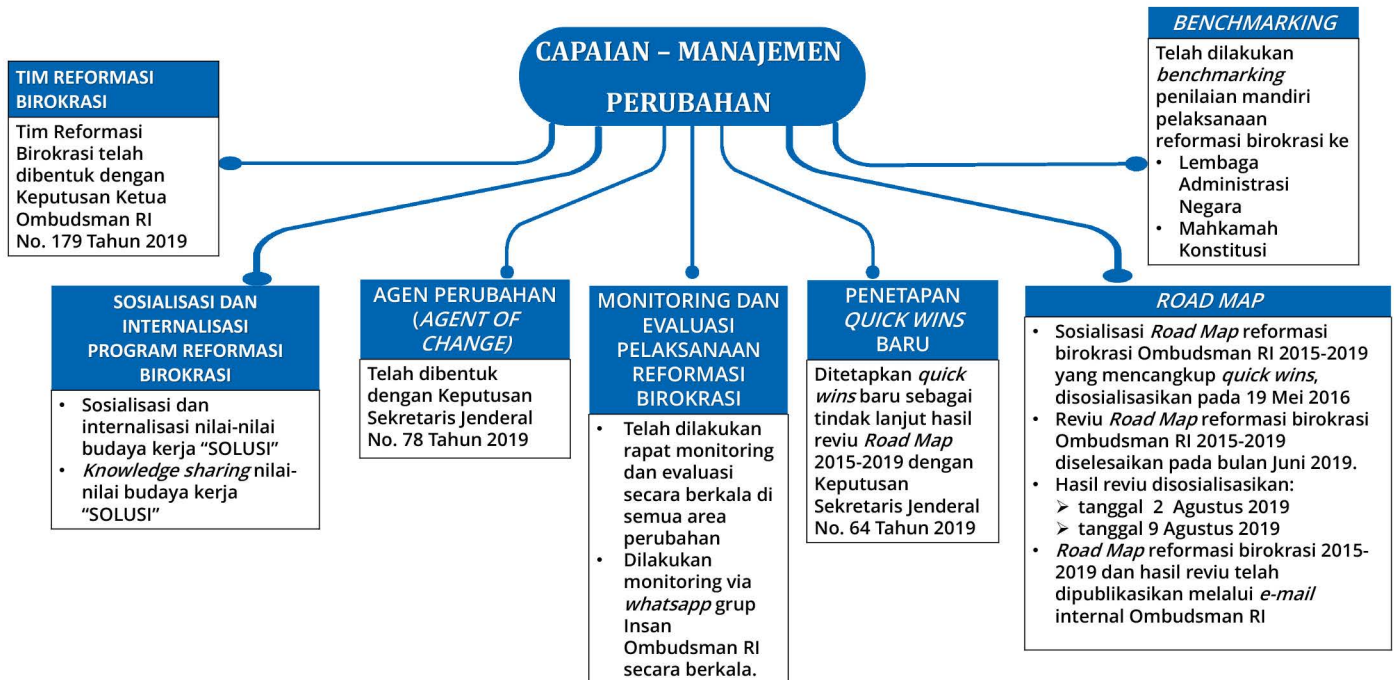


2 TIMELINE

MANAJEMEN PERUBAHAN

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Reviu <i>road map</i>	1. Reviu <i>road map</i> 2015-2019 dan Rekomendasi perumusan <i>quick wins</i> 2. Penetapan <i>quick wins</i>	Februari – Juni
2	Nilai-nilai budaya unggul SOLUSI (Sopan, Lugas, Sigap)	1. Sosialisasi nilai-nilai SOLUSI 2. <i>Knowledge sharing</i>	Februari – Juni
3	Pelaksanaan reformasi birokrasi di Perwakilan	Surat Edaran tentang Pelaksanaan reformasi birokrasi di Perwakilan	Februari – Juni
4	Agen perubahan reformasi birokrasi	Penetapan agen perubahan	Februari – Juni
5	Penunjukan Asesor	Penetapan Asesor dan keikutsertaan Asesor dalam reformasi birokrasi	Februari – Juni
6	Rencana kerja	1. Inventarisasi rencana kerja masing-masing kelompok kerja 2. Sosialisasi rencana kerja	Februari - Juni

3 URAIAN CAPAIAN



4 TIM PENGARAH REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.
Ketua Ombudsman RI
Pengarah



Lely Pelitasari Soebekty, S.P., M.E.
Wakil Ketua Ombudsman RI
Pengarah



Ahmad Alamsyah Saragih, S.E.
Anggota Ombudsman RI
Penanggung Jawab



Dr. Suganda Pandapotan Pasaribu, A.P., M.Si.
Sekretaris Jenderal
Ketua Tim



Triyoga M. Habibi, S.H.
Asisten Madya
Sekretaris Tim

5

TIM PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI OMBUDSMAN RI

KELOMPOK KERJA - MANAJEMEN PERUBAHAN

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Hartoyo	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Wakil Ketua	Herru Kriswahyu	Asisten Utama
Anggota	Ani Samudra Wulan	Asisten Madya
	Tumpal Simanjuntak	Asisten Muda
	Saputra Malik	Asisten Pratama
	Olvi Lusianti Dewi	Asisten Pratama
	Kuncoro Harimurti	Kepala Bagian Fasilitas Keuangan Perwakilan
	Fitri Afiani	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran Wilayah II
	Tri Astanto	Kepala Subbagian Penyusunan Program dan Anggaran
	Adrianus Herwasto	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia
	Junika Pretty Resistina Rajagukguk	Kepala Subbagian Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri
	Ardiansyah	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

KELOMPOK KERJA - PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Dwi Ciptaningsih	Kepala Biro Hukum, Kerja Sama, dan Organisasi
Wakil Ketua	Siti Uswatun Hasanah	Asisten Muda
Anggota	Nyoto Budiarto	Asisten Muda
	Yustus Yoseph Martubongs	Asisten Muda
	Aat Sugihartati	Asisten Pratama
	Dessy Ratnasari	Asisten Pratama
	Muhammad Komarudin	Kepala Subbagian Advokasi Hukum dan Ajudikasi
	Rajasa Dravida	Kepala Subbagian Fasilitas Reformasi Birokrasi
	Evi Dwi Handayani	Kepala Subbagian Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri
	Ika Ratna Widiastuti	Perancang Peraturan Perundang-undangan Pertama
	Artati Subagio	Kepala Subbagian Dokumentasi dan Diseminasi Hukum
	Marsya Putri Nastiti	Auditor Pelaksana

KELOMPOK KERJA - PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Gunawan Irwin Siallagan	Kepala Bagian Kerja Sama
Wakil Ketua	Irsan Hidayat	Asisten Pratama
Anggota	Ahmad Sobirin	Asisten Pratama
	James Marihot Panggabean	Asisten Pratama
	Rudi Kurniawan	Asisten Pratama
	Rezky Septianto	Asisten Pratama
	Yuni Susita Dewi	Kepala Bagian Organisasi dan Fasilitasi Reformasi Birokrasi
	Muhammad Yudi Pamungkas	Kepala Subbagian Kelembagaan
	Lutfi Gandhi Sandhika	Kepala Subbagian Perlengkapan dan Penatausahaan Aset
	Nurma Wijareni	Kepala Subbagian Pelaksanaan Anggaran
	Anita Widyaning Putri	Kepala Subbagian Hubungan Antar Lembaga
	Angga Setiadi	Auditor Pelaksana

KELOMPOK KERJA - PENATAAN DAN PENGUATAN TATA LAKSANA

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Wanton Sidauruk	Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Teknologi Informasi
Wakil Ketua	Patnuaji Agus Indrato	Asisten Utama
Anggota	Ahmad Fauzi	Asisten Pratama
	Syahroni	Asisten Pratama
	Mianda Juwita Wardani	Asisten Pratama
	Nadia Dewangga	Asisten Pratama
	Heru Tjahjono	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
	Maruli Arijaya Junior Gregorius	Kepala Bagian Data dan Layanan Kepustakaan
	Leni Milana	Kepala Bagian Teknologi Informasi
	Firman Yudi Putra	Kepala Subbagian Pengembangan Aplikasi
	Dodi Sutejo	Kepala Subbagian Tata Persuratan dan Kearsipan
	Rinny Dharma Diani	Kepala Subbagian Tata Laksana

KELOMPOK KERJA - MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Johar Walesman Marpaung	Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum
Wakil Ketua	Zainal Mutaqin	Asisten Pratama
Anggota	Achmad Syarkowi Jazuli	Asisten Pratama
	Maulana Putra	Asisten Pratama
	Chasidin	Asisten Pratama
	Dhurandra Tri Widigda	Asisten Pratama
	Christo Victor Nixon Toar	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol
	Danny Primawan	Kepala Bagian Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai
	Zaily Oktosab Fitri Abidin	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
	Dicky Yosepial	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Layanan Pengadaan
	Nur Muin Susanto	Kepala Subbagian Administrasi Kepegawaian
	Virgian Adi Saputra	Kepala Subbagian Mutasi dan Disiplin Pegawai

KELOMPOK KERJA - PENGUATAN PENGAWASAN

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Marsetiono	Inspektur
Wakil Ketua	Elisa Luhulima	Asisten Madya
Anggota	Muhson Andika Jaya	Asisten Pratama
	Fika Taufiqurrahman	Asisten Pratama
	Subandi	Asisten Pratama
	Yulie Prihatini Indri	Kepala Subbagian Tata Usaha Inspektorat
	Mohammad Bahransyah Lamatenggo	Auditor Muda
	Ida Bagus Rai Girinda	Auditor Pertama
	Eka Rahmawati Syafa'ah	Auditor Pertama
	Stefanus Lugas Praswoto	Kepala Subbagian Keamanan Informasi dan Jaringan
	Ahmad Ridwansyah	Kepala Subbagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa
	Irma Nurjannah	Pengelola Administrasi Pemerintahan

KELOMPOK KERJA - PENGUATAN AKUNTABILITAS

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Dominikus Dalu	Asisten Utama
Wakil Ketua	Royana Monoarfa	Kepala Bagian Perencanaan
Anggota	Siska Widyawati	Asisten Madya
	Ratna Sari Dewi	Asisten Muda
	Nugroho Eko Martono	Asisten Muda
	Noerman Adi Santoso	Kepala Bagian Keuangan Pusat
	Indahwati	Kepala Bagian Akuntansi Dan Pelaporan
	M. Yusuf Nugroho	Kepala Subbagian Perbendaharaan
	Tri Yulianto	Kepala Subbagian Verifikasi
	Stefianus Ingkiriwang	Kepala Subbagian Pemeliharaan dan Rumah Tangga
	Muhammad Pulung Aji Sukmo	Kepala Subbagian Pelaksana Anggaran Wilayah I

KELOMPOK KERJA - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SUSUNAN TIM	NAMA	JABATAN / UNIT KERJA
Ketua	 Amran	Kepala Biro Fasilitasi Pelayanan Teknis
Wakil Ketua	Awidya Mahadewi	Asisten Utama
Anggota	Hasymi Muhammad	Asisten Madya
	Diah Suryaningrum	Asisten Muda
	Santi Wijayanti	Asisten Pratama
	Pepi Pitria	Asisten Pratama
	Sintha Cattelya	Kepala Bagian Fasilitas Pengelolaan dan Dokumentasi Laporan Masyarakat
	Eko Riswanto	Kepala Bagian Fasilitas Pemeriksaan Khusus dan Kajian
	Heru Purwadi	Kepala Bagian Fasilitas Pengendalian Mutu
	Fuad Mushofa	Kepala Subbagian Kemitraan Strategis dan Pengembangan Jejaring Masyarakat
	Maharandy Fadlan Monoarfa	Kepala Subbagian Pemberitaan, Publikasi dan Dokumentasi

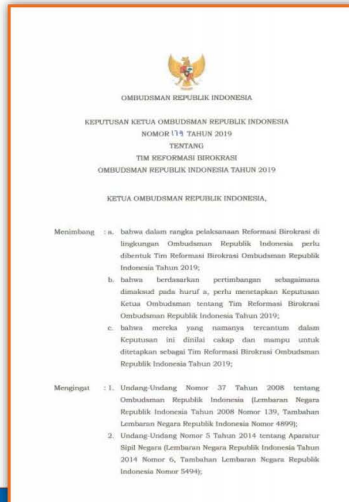
6 DATA DUKUNG



Benchmarking
Mahkamah Konstitusi Pelaksanaan PMPRB



Benchmarking
Lembaga Administrasi Negara
Pelaksanaan PMPRB



Penetapan Tim Reformasi Birokrasi



Rapat Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Rapat Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi



Penetapan Agen Perubahan



Indahwati
Agen Perubahan



Sosialisasi Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019
pada Tahun 2016



Sosialisasi Road Map
Reformasi Birokrasi 2015-2019
pada Tahun 2016



Reviu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019



Pembahasan Reviu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019



Sosialisasi Reviu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019



Arahan Ketua Ombudsman RI pada CPNS 2019



Pembekalan CPNS 2019 tentang Ombudsman RI



Yel-Yel Budaya Kerja "SOLUSI" Sebagai ciri khas, Penyemangat dan Kebersamaan yang Terungkap dalam Kata dan Gerak



Apel Rutin Kesiapan



Peningkatan Budaya Kerja PRIMA dan SOLUSI



Sharing Knowledge Budaya SOLUSI



Apel Sore Arahan Sekretaris Jenderal



Peningkatan Minat Baca



B CAPAIAN - PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1 RENCANA KERJA

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya kualitas pengelolaan peraturan perundang-undangan



2 TIMELINE

PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Evaluasi peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Laporan hasil evaluasi perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Desember 2019
2	Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Rancangan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Desember 2019
3	Penetapan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI	Desember 2019

3 URAIAN CAPAIAN

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Sistem pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan yang mensyaratkan adanya rapat koordinasi, naskah kajian dan paraf koordinasi yang telah terimplementasi di lingkungan Ombudsman RI.
- Harmonisasi melalui indentifikasi, analisis, dan pemetaan peraturan perundang-undangan di lingkungan Ombudsman RI.

PENYELARASAAN PERATURAN

Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan pada Ombudsman RI

PERATURAN BARU OMBUDSMAN RI

1	Ditetapkan	11
2	Selesai harmonisasi	1
3	Proses pengajuan	3
Total		15

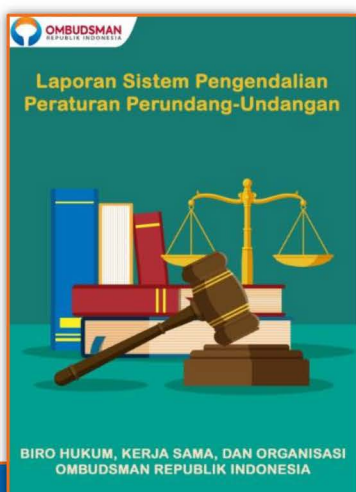
REVISI PERATURAN OMBUDSMAN RI

1	Revisi ditetapkan	3
2	Revisi selesai harmonisasi	-
3	Proses pengajuan	1
Total		4

PENCABUTAN PERATURAN OMBUDSMAN RI

1	Ditetapkan	3
2	Proses tanda tangan Ketua Ombudsman RI	-
3	Proses pengajuan	1
Total		4

4 DATA DUKUNG



Laporan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Peraturan Perundang-undangan



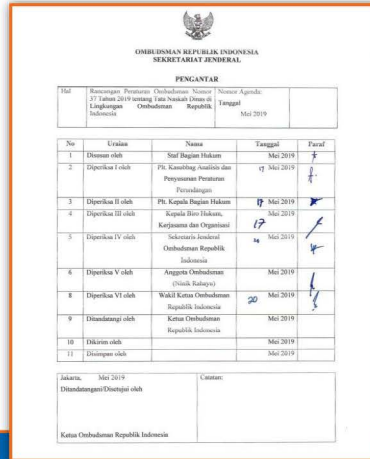
Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Ombudsman RI



Laporan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan



Naskah Kajian Rancangan
Peraturan Ombudsman RI

Paraf Koordinasi Rancangan
Peraturan Ombudsman RI

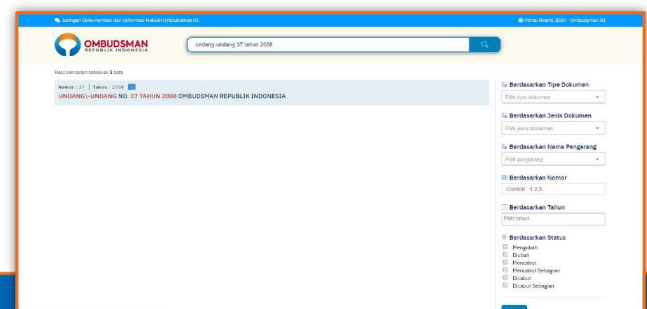
Pelaksanaan Uji Publik
Rancangan Peraturan Ombudsman RI



Pelaksanaan Uji Publik
Rancangan Peraturan Ombudsman RI



Tampilan Depan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Ombudsman RI



Tampilan Hasil Pencarian Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Ombudsman RI

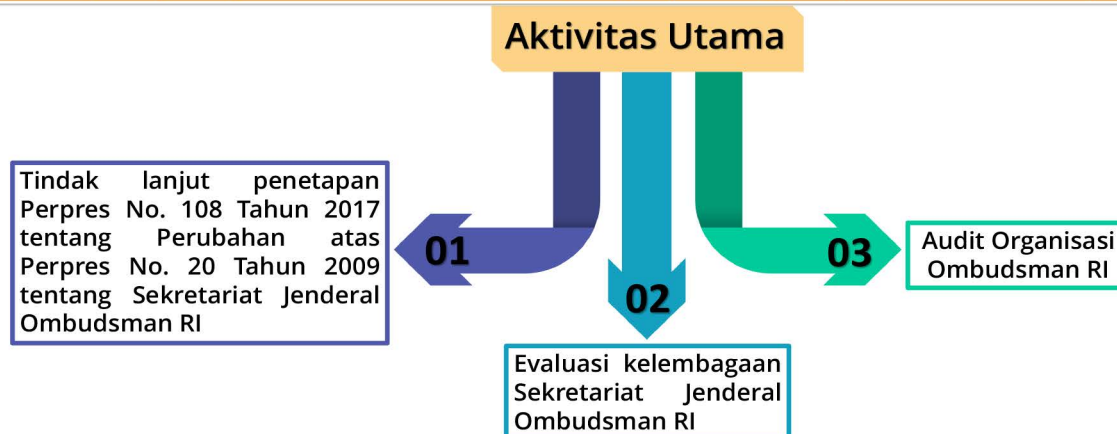
CAPAIAN - PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

1 RENCANA KERJA

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

SASARAN STRATEGIS:

Meningkatnya organisasi Ombudsman RI yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat guna



2 TIMELINE

PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Tindak lanjut penetapan Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	Penetapan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	Januari - Juni 2019
2	Evaluasi kelembagaan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI	Laporan hasil evaluasi	Juli - Agustus 2019
3	Audit organisasi Ombudsman RI	Laporan hasil audit	April - September 2019

3 URAIAN CAPAIAN

PENATAAN ORGANISASI

- Pada tahun 2018 telah dilakukan koordinasi dengan KemenPANRB terkait proses penyusunan Peraturan Sekretaris Jenderal pasca ditetapkannya Peraturan Presiden No. 108 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2009 tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.
- Pada bulan Oktober Tahun 2018 ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
- Pada tahun 2019 telah dilaksanakan pelantikan para pejabat struktural di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI dengan penyesuaian nomenklatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia

AUDIT DAN EVALUASI ORGANISASI

- Telah dilakukan audit organisasi bekerja sama dengan Lembaga Administrasi Negara (LAN) dan *Knowledge Sector Initiative* (KSI)
- Telah dilakukan *knowledge sharing* dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)
- Telah dilakukan sosialisasi PermenPANRB No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah
- Telah dilakukan evaluasi kelembagaan pada level eselon II dan pada eselon I



4 DATA DUKUNG



Laporan Pelaksanaan Audit Organisasi oleh Lembaga Administrasi Negara



Pelaksanaan FGD Audit Organisasi Sekretariat Jenderal



Pelaksanaan FGD Audit Organisasi Perwakilan Ombudsman Banten



Pelaksanaan FGD Audit Organisasi Keasistenan



Pelaksanaan Wawancara Pimpinan

**Laporan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Jenderal**



BIRO HUKUM, KERJA SAMA, DAN ORGANISASI
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Laporan Evaluasi Kelembagaan
Sekretariat Jenderal



Rapat Persiapan Evaluasi Kelembagaan



Pendampingan Pengisian Kertas Kerja
Evaluasi Kelembagaan
Biro Perencanaan dan Keuangan



Sosialisasi PermenPANRB tentang
Evaluasi Kelembagaan



Pendampingan Pengisian Kertas Kerja
Evaluasi Kelembagaan
Biro Fasilitas Pelayanan Teknis



Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama



Pelantikan Pejabat Administrator dan Pengawas



Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal



Knowledge Sharing Budaya Kerja, Struktur
Organisasi, Tata Kerja, dan Proses Bisnis



Narasumber (ki-ka) dari KPK, LAN, dan BPK

D CAPAIAN - PENATAAN TATA LAKSANA

1 RENCANA KERJA

PENATAAN TATA LAKSANA

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya efektivitas dan efisiensi tata kelola administrasi kearsipan dan mekanisme kerja
2. Meningkatnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan kualitas pelayanan
3. Meningkatnya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik



2 TIMELINE

PENATAAN TATA LAKSANA

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Penyusunan kebijakan yang mengatur mekanisme kerja	Peraturan Sekretaris Jenderal ORI tentang peta proses bisnis dan SOP	Januari – September 2019
2	Penerapan kebijakan mekanisme kerja dan tata kelola administrasi kearsipan sesuai dengan perkembangan teknologi dan penyesuaian kebijakan pemerintah	1. Kebijakan tentang tata naskah dinas 2. Implementasi kode klasifikasi arsip 3. Implementasi jadwal retensi arsip 4. Pembentukan unit kearsipan	Januari – September 2019
3	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai <i>quick wins</i> dalam upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Penyusunan Aplikasi: 1. SIKD 2. JDIH 3. AoRA 4. ASCaL 5. Pusdatin 6. ASPAL 7. ASIK	Januari – September 2019
4	Penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Keputusan Ketua tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	Januari – September 2019

3 URAIAN CAPAIAN

PENYUSUNAN PROSES BISNIS DAN SOP

Proses Bisnis

- Telah dilakukan reviu proses bisnis dan penyusunan peta proses bisnis Sekretariat Jenderal Ombudsman.
- Telah terdapat penetapan Sekretaris Jenderal tentang proses bisnis.
- Telah dilaksanakannya Sosialisasi PermenPANRB No. 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Proses Bisnis Lembaga Pemerintah
- Telah dilaksanakannya koordinasi dan pendampingan oleh KemenPANRB dalam penyempurnaan peta proses bisnis

Standar Operasional Prosedur

- Telah dilakukan evaluasi SOP sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No.1 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
- Telah dilaksanakannya sinkronisasi dan finalisasi SOP yang telah disesuaikan dan telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 3 Tahun 2019 tentang Penerapan SOP di lingkungan Sekretariat Jenderal

PENERAPAN E-GOVERNMENT

- Draft grand design Informasi Teknologi
- Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Sebagai Quick Wins
 - SIKD
 - AoRA
 - ASCaL
 - Pusdatin
 - ASPAL
 - ASIK
- Implementasi aplikasi SIMPORI
- Website Ombudsman
- Pembangunan jaringan VPN di kantor Pusat dan Perwakilan
- Pengembangan presensi Insan Ombudsman

PENGLOLAAN KEARSIPAN

- Telah ditetapkan Peraturan Ombudsman No. 37 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
- Telah disusun Keputusan Ketua No 39 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Surat dan Tata Kearsipan
- Telah disusun Keputusan Ketua No. 143 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Arsip
- Telah disusun Keputusan Ketua No. 144 Tahun 2019 tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Ombudsman
- Telah disusun Keputusan Ketua No. 146 Tahun 2019 tentang Pengorganisasian Unit Kearsipan di Lingkungan Ombudsman RI
- Telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan kearsipan
- Telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan arsip aktif
- Pelaksanaan sistem informasi kearsipan dinamis
- Pemusnahan arsip sesuai dengan surat persetujuan Kepala ANRI No. KN/00.03/123/2018 perihal Persetujuan Pemusnahan Arsip tanggal 22 Juni sebanyak 22.434 berkas
- Pembentukan Unit Kearsipan sesuai dengan Keputusan Ketua No. 001/ORI-SK/2019
- Pembentukan Tim Penilai Arsip berdasarkan Keputusan Ketua No. 055/TU.04.01/LV/2018

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

- Surat Keputusan Ketua No. 180 Tahun 2019 tentang Susunan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Ombudsman RI
- Surat Edaran Ketua Ombudsman No. 7 Tahun 2019 tentang Pengumpulan Daftar Informasi
- Surat Keputusan Ketua No. 217 Tahun 2019 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di lingkungan Ombudsman RI
- Sedang dilakukan proses revisi Peraturan Ombudsman No. 16 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Ombudsman RI
- Penambahan kanal khusus PPID di website www.ombudsman.go.id
- Laporan triwulan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Ombudsman RI
- Monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi Publik

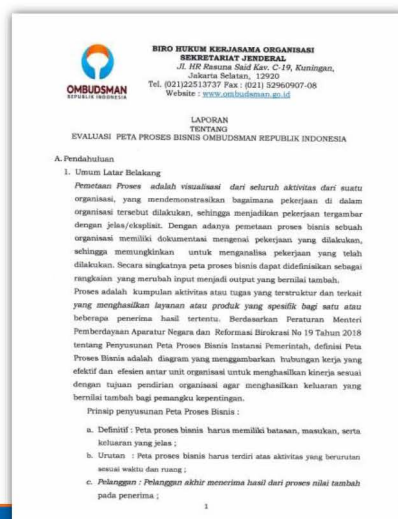
4 DATA DUKUNG



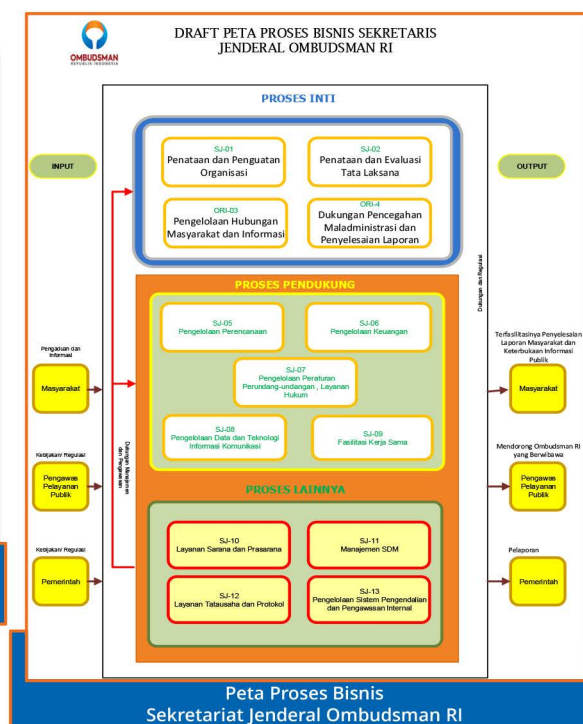
Sosialisasi Penyusunan Proses Bisnis Instansi Pemerintah



Rapat Koordinasi dengan KemenPANRB terkait Penyusunan Peta Proses Bisnis



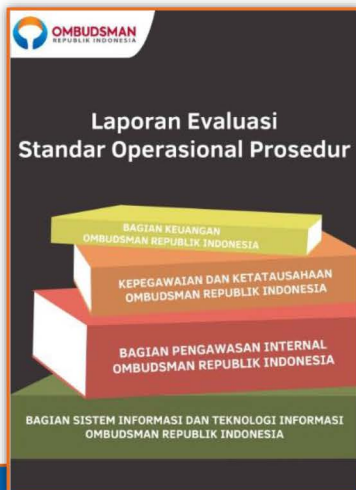
Laporan Evaluasi Peta Proses Bisnis Ombudsman RI



Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Ombudsman RI



Rapat Koordinasi dengan KemenPANRB terkait
Penyusunan SOP Administrasi Pemerintah



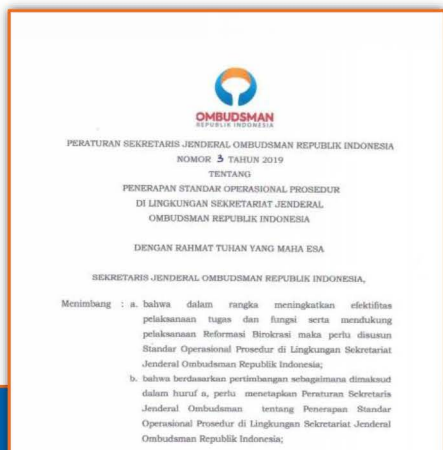
Laporan Evaluasi
Standar Operasional Prosedur



Sosialisasi Penyusunan
Peta Proses Bisnis dan SOP



Penyusunan Daftar Informasi Publik dengan
Narasumber dari Komisi Informasi Publik



Penetapan Standar Operasional Prosedur



Laporan Survey Pelayanan Informasi



Penetapan Daftar Informasi Publik



Sosialisasi Tata Naskah Dinas dan SOP



Pelaksanaan Pengawasan Kearsipan 2019



Bimbingan Teknis Pemberkasan Arsip Aktif



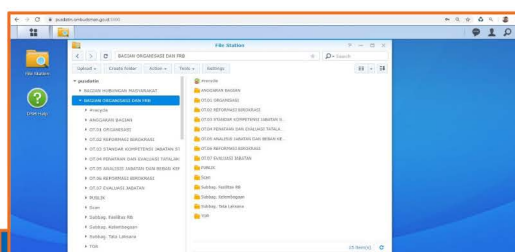
Tata Naskah Dinas



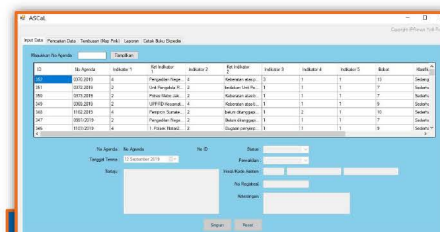
Laporan IT Security Assessment Ombudsman RI oleh Badan Sandi dan Siber Negara



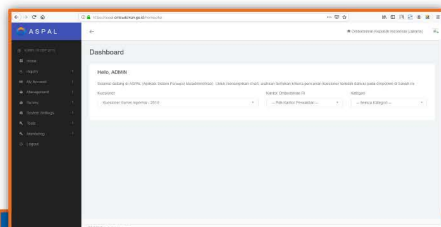
Aplikasi SIKD



Aplikasi Pusdatin



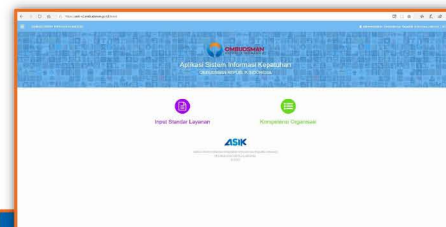
Aplikasi ASCaL



Aplikasi ASPAL



Aplikasi AoRA



Aplikasi ASiK



CAPAIAN - PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

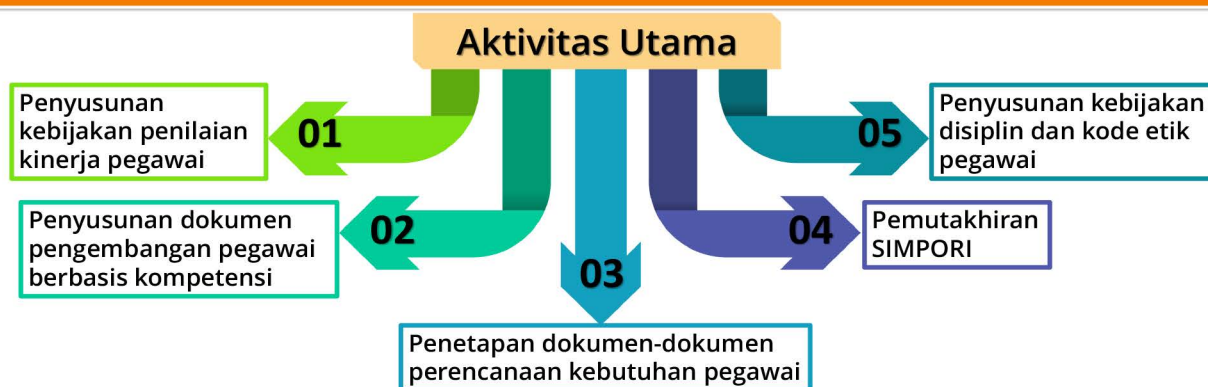


RENCANA KERJA

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya profesionalitas dan kinerja pegawai
2. Meningkatnya kualitas pengembangan pegawai berbasis kompetensi
3. Meningkatnya kualitas penetapan rencana kebutuhan pegawai
4. Meningkatnya kualitas sistem informasi kepegawaian
5. Meningkatnya kualitas kedisiplinan dan etika pegawai

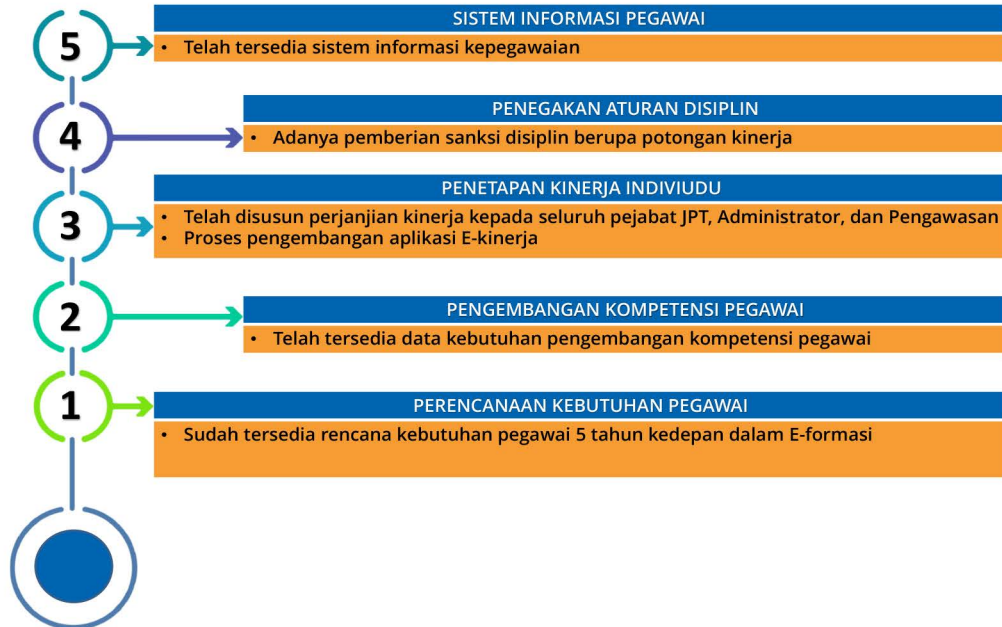


TIMELINE

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Penyusunan dokumen pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Dokumen identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	Juni - Agustus 2019
2	Penetapan dokumen-dokumen perencanaan kebutuhan pegawai	Dokumen Evaluasi Jabatan, Analisa Jabatan, dan Analisis Beban Kerja	Januari - Februari 2019
3	Pemutakhiran SIMPORI	Sistem Informasi	Oktober - Desember 2019
4	Penyusunan kebijakan disiplin dan kode etik pegawai	Dokumen Peraturan Ombudsman tentang disiplin dan kode etik pegawai	Januari - Desember 2019
5	Meningkatkan profesionalitas dan kinerja pegawai	Dokumen Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Penilaian Kinerja Pegawai	Juli - November 2019

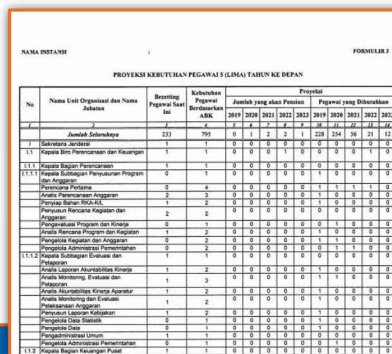
3 URAIAN CAPAIAN



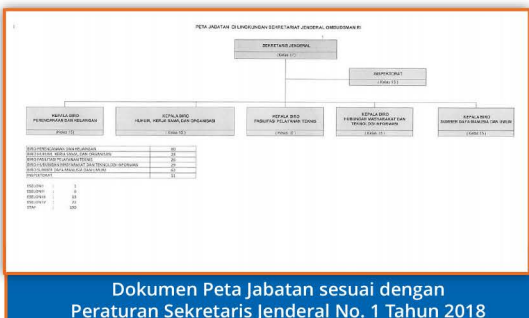
4 DATA DUKUNG



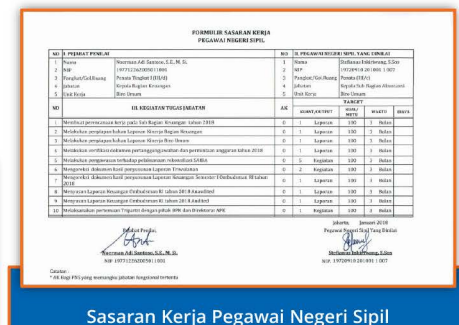
Kebutuhan Pegawai pada Aplikasi E-Formasi



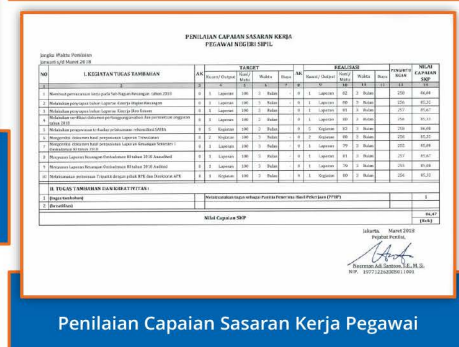
Dokumen Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil 5 Tahun ke Depan



Dokumen Petas Jabatan sesuai dengan Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2018



Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil



Penilaian Capaian Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil



Pelaksanaan Test CAT seleksi CPNS 2018

[illegible]

Laporan Hasil Computer Assisted Test CPNS 2018



Pelaksanaan Test CAT Seleksi JPT



Seleksi Kepala Perwakilan Ombudsman RI



Pelaksanaan FGD Seleksi JPT



Sosialisasi Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi



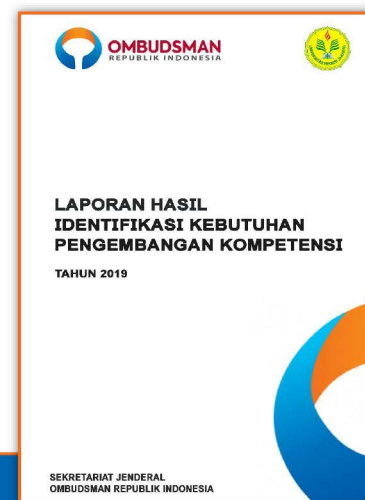
**Teleconference dengan PNS Perwakilan terkait
Wawancara Identifikasi Kebutuhan
Pengembangan Kompetensi**



Wawancara Identifikasi Kebutuhan
Pegembangan Kompetensi PNS Pusat



Pelaksanaan Uji Kompetensi Asisten Utama



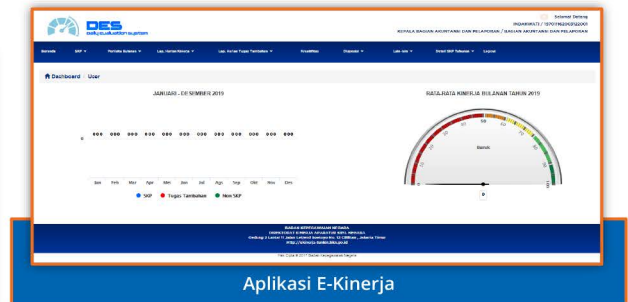
Laporan Pelaksanaan Identifikasi Kebutuhan Pengembangan Kompetensi



Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil



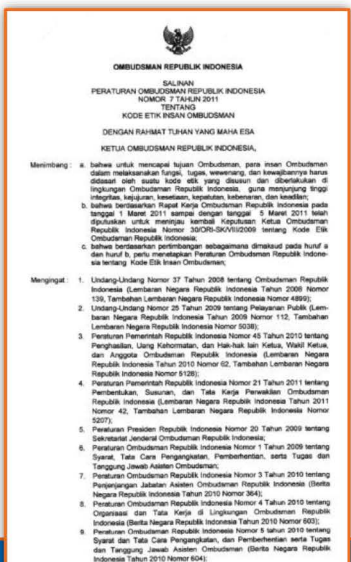
Insentif Asisten Ombudsman



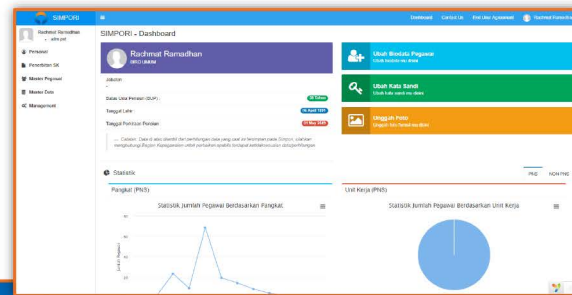
Aplikasi E-Kinerja



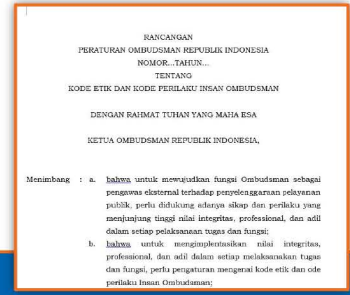
Draft Peraturan tentang Penilaian Kinerja



Kode Etik Insan Ombudsman



Aplikasi SIMPORI



Draft Peraturan Kode Etik Insan Ombudsman



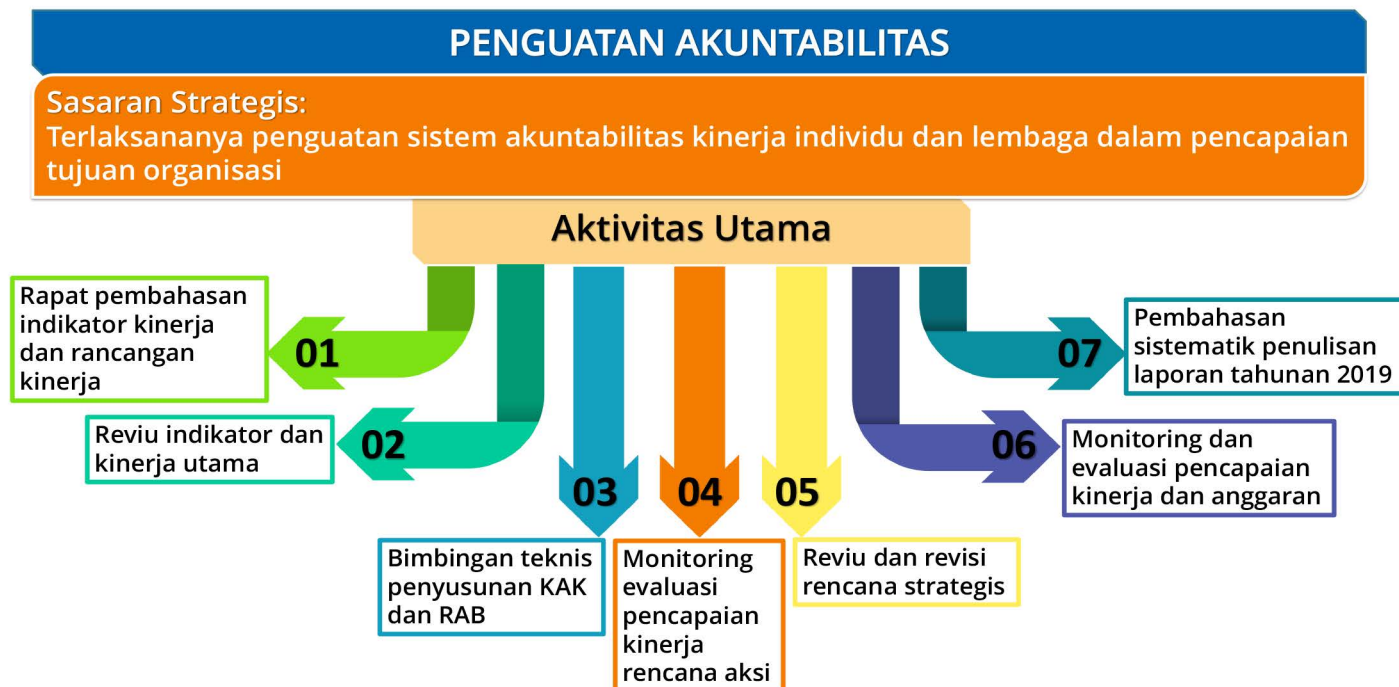
Penyerahan Piagam Pegawai Teladan



Peningkatan Kebugaran tiap Jumat

F CAPAIAN - PENGUATAN AKUNTABILITAS

1 RENCANA KERJA



2 TIMELINE

PENGUATAN AKUNTABILITAS			
NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Rapat pembahasan indikator kinerja dan rancangan kinerja	Dokumen perjanjian kinerja	April 2019
2	Reviu indikator dan kinerja utama	Dokumen indikator kinerja utama	April 2019
3	Bimbingan teknis penyusunan KAK dan RAB	Dokumen kerangka acuan kerja dan rancangan anggaran biaya	Agustus 2019
4	Monitoring evaluasi pencapaian kinerja rencana aksi	Laporan monitoring dan evaluasi rencana aksi perjanjian kinerja	Juli 2019
5	Rancangan awal rencana strategis	Draft rencana strategis	September 2019
6	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja dan anggaran	Laporan realisasi kinerja dan anggaran	Oktober 2019
7	Pembahasan sistematis penulisan laporan tahunan 2019	TOR laporan tahunan	September 2019

3 URAIAN CAPAIAN

IALOG KINERJA

Telah dilakukan rapat koordinasi Tim pada bulan Juli sampai dengan Agustus 2019, evaluasi atas penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2018 dan rencana tindaklanjutnya. Melakukan pemetaan permasalahan, pencapaian kinerja dan resolusi di tahun 2019 dengan melibatkan seluruh unsur pimpinan

PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA

Telah disusun Perjanjian Kinerja pada Februari 2019 dan Revisi Perjanjian Kinerja pada bulan Juni 2019 yang dihadiri oleh Pimpinan dan telah ditandatangani oleh pejabat eselon I-IV di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

REVUE DAN REVISI RENSTRA

Telah disusun dan direvisi Renstra Ombudsman RI 2015-2019 dan penyusunan dan penetapan Renstra 2020-2024 Ombudsman RI

APLIKASI E-PERFORMANCE BASED BUDGETING

Dalam rangka progres perencanaan dan penganggaran telah mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi KRISNA baik untuk penggunaan rencana strategis dan rencana kerja yang dikembangkan oleh Bappenas serta aplikasi e-SMART dan SATU DJA untuk pelaporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja K/L

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

Telah dilakukan reviu terhadap IKU karena adanya perubahan dan pengembangan struktur organisasi sesuai Peraturan Sekretaris Jenderal No. 1 Tahun 2019

PELATIHAN AKUNTABILITAS KINERJA

Telah dilakukan pelatihan akuntabilitas kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman RI.

MONEV KINERJA

Telah dilaksanakan dan dibuat laporan hasil monev dan anggaran triwulan I dan triwulan II dimulai pada awal April sampai dengan awal Juli. Selanjutnya untuk monev triwulan III dan triwulan IV akan dimulai awal Oktober sampai dengan awal Januari tahun berikutnya. Kegiatan ini dilaporkan kepada Pimpinan dan dihadiri oleh masing-masing unit Eselon II atau Perwakilan

CASCADING KINERJA ORGANISASI

Dalam rangka perumusan dan penajaman serta evaluasi indikator kinerja, telah dilakukan kegiatan penyusunan *cascading* kinerja dengan melibatkan unit-unit kerja terkait. Hasil dokumen *cascading* sebagai perjalanan kinerja organisasi dengan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis kinerja.

PEDOMAN AKUNTABILITAS KINERJA

Dalam penyusunan laporan akuntabilitas, Ombudsman RI telah menyusun pedoman akuntabilitas kinerja. Pedoman ini disusun sebagai acuan dalam penyusunan laporan akuntabilitas yang memuat tentang langkah-langkah dan tahapan penyusunan LAKIP dengan memperhatikan sistematisasi yang tertuang di dalamnya.

4 DATA DUKUNG

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Prof. Amzulian Rifal, S.H., LL.M., Ph.D
Jabatan : Ketua Ombudsman Republik Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2019

KETUA
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Prof. AMZULIAN RIFAL, S.H., LL.M., Ph.D

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP. 197309161993111001

Perjanjian Kinerja Sekretaris Jenderal

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIRU HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA
SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Heryanto
Jabatan : Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tenaga Kerja
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Suganda Pandapotan Pasaribu
Jabatan : Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Juni 2019

SEKRETARIS JENDERAL
OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
SUGANDA PANDAPOTAN PASARIBU
NIP. 197309161993111001

KEPALA BIRU HUBUNGAN MASYARAKAT DAN TENAGA KERJA
HERYANTO
NIP. 196103011980101001

Perjanjian Kinerja Seluruh Eselon II

KEMENTERIAN KESEHATAN RI									
KEMENTERIAN KEMAHKAMATAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									
KEMENTERIAN KEMERIAAN RI									

Cascading Kinerja



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2019



Rapat Penyusunan Cascading



Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perwakilan

- YB:
1. Anggota Ombudsman Republik Indonesia
 2. Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia
 3. Para Kepala Biro
 4. Para Kepala Bagian
 5. Para Kepala Kaseksian
 6. Para Kepala Unit Kerja

SURAT EDARAN
NOMOR 117-JOR-SEKX2018
TENTANG
RAPAT PIMPINAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

- Dalam rangka meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (selanjutnya disebut Pimpinan) dengan Asisten dan Sekretariat Jenderal, diinformasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Rapat antara Pimpinan dengan Asisten dan Sekretariat Jenderal dilaksanakan: Hari : Selasa Waktu : pukul 08.00 WIB sd selesai Agenda : tindak lanjut hasil pleno dan agenda lainnya Tempat : Ruang Rapat Abdurrahman Wahid.
 2. Rapat dipimpin oleh Pimpinan. Dalam hal tertentu dapat menugaskan Sekretaris Jenderal untuk memimpin rapat.
 3. Peserta rapat adalah:
 - Sekretaris Jenderal;
 - Para Kepala Biro;
 - Para Kepala Bagian sesuai agenda/kebutuhan;
 - Para Kepala Kaseksian; dan
 - Para Kepala Unit Kerja.

Demikian Surat Edaran ini untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Ditetapkan di: Jakarta
pada tanggal 17 September 2018
KEPALA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,
Prof. Abdul Aziz, S.H., LL.M., Ph.D.

Jadwal Tetap Rapat Pimpinan



Rapat Pimpinan



Bimbingan Teknis Penyusunan KAK dan RAB



Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Penyuusunan LAKIP



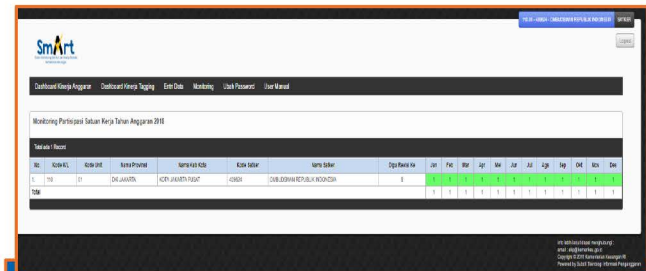
Monitoring dan Evaluasi Kinerja Perwakilan

Sinkronisasi
Indikator dan Target Kinerja 2019Sinkronisasi
Indikator dan Target Kinerja 2019

Aplikasi E-Money

NO	KODE	NOMENKLATUR INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET 2019	TARGET 2020	TARGET 2021	TARGET 2022	SATUAN
1	01.01	Persentase Pengaduan Masyarakat atau Pelayanan Publik yang Ditindaklanjuti	95,0	N/A	N/A	N/A	%
2	01.02	Jumlah Pelaksanaan Survei Kepuasan K/L/Pemda atas Pelaksanaan UJ Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik	1,0	N/A	N/A	N/A	Kali
3	01.03	Jumlah Penyelesaian Keluhan Pelayanan Publik	7,0	N/A	N/A	N/A	Persentase
4	01.04	Persentase Instansi Pemerintah yang memiliki Unit Pengelolaan Pengaduan	60,0	N/A	N/A	N/A	%
5	01.05	Persentase Integrasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SPNPN)	60,0	N/A	N/A	N/A	%

Aplikasi Krisna



Aplikasi E-Smart



CAPAIAN - PENGUATAN PENGAWASAN

1

RENCANA KERJA

PENGUATAN PENGAWASAN

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kepatuhan pelaporan gratifikasi, LHKPN, dan LHKASN
2. Meningkatnya penerapan SPIP
3. Meningkatnya layanan pengaduan masyarakat dan *whistle blowing system* (WBS)
4. Meningkatnya penerapan benturan kepentingan
5. Membangun zona integritas
6. Meningkatkan IACM APIP

Aktivitas Utama

Penyampaian laporan gratifikasi, LHKPN, dan LHKASN

01

Evaluasi mandiri penerapan SPIP

02

Pembangunan layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi

03

Penyusunan kebijakan penanganan benturan kepentingan

04

Peningkatan nilai IACM APIP level 2 menuju 3

06

Pembangunan zona integritas

05

2 TIMELINE

PENGUATAN PENGAWASAN

NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Penyampaian laporan gratifikasi, LHKPN, LHKASN	Laporan gratifikasi, LHKPN, LHKASN	September 2019
2	Evaluasi mandiri penerapan SPIP	Dokumen peta risiko, sosialisasi SPIP, hasil evaluasi mandiri penerapan SPIP	September 2019
3	Pembangunan layanan pengaduan masyarakat berbasis aplikasi	Sistem informasi WBS	September 2019
4	Penyusunan kebijakan penanganan benturan kepentingan	Dokumen pengusulan Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan Kode Perilaku	September 2019
5	Pembangunan zona integritas	Dokumen pembangunan zona integritas	September 2019
6	Peningkatan nilai IACM APIP level 2 menuju 3	Evaluasi mandiri IACM	September 2019

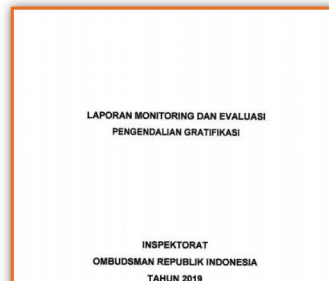
3 URAIAN CAPAIAN

PENGENDALIAN GRATIFIKASI	APIP	PENGADUAN MASYARAKAT DAN WHISTLE BLOWING SYSTEM
- Telah dibentuk PPG berdasarkan Peraturan Ombudsman No. 21 Tahun 2016 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Ombudsman RI - Telah dilakukan uji publik dan sosialisasi pengendalian gratifikasi - Telah dilakukan evaluasi pengelolaan pengendalian gratifikasi - Telah dilakukan sosialisasi pengisian LHKASN - Telah diumumkan keterbukaan informasi atas pengisian LHKPN melalui <i>website</i> Ombudsman RI - Telah dikeluarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal yang mewajibkan pengisian LHKASN di lingkungan Ombudsman RI - Telah dilakukan monitoring terhadap pelaporan LHKASN dan LHKPN	- Telah ditingkatkan struktur organisasi APIP Ombudsman RI menjadi eselon 2 - Telah ditingkatkan jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat dengan masuknya Inspektur, Auditor Muda, Kasubbag Tata Usaha Inspektorat, serta penambahan 4 CPNS baru - Telah dilakukan bimtek terkait peningkatan kapabilitas APIP oleh BPKP - Telah dilakukan pengembangan diklat kepada seluruh pegawai di Inspektorat - Telah dimulai kegiatan telaah sejawat APIP Ombudsman RI atas binaan AAPI - Telah disusun PKPT Inspektorat yang berbasis risiko - Telah dilakukan audit kinerja - Telah dilakukan Sosialisasi SIBIJAK dalam perhitungan angka kredit Auditor - Telah dijalankan peran konsultasi APIP dalam proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Ombudsman RI - Telah dilakukan penilaian mandiri atas kapabilitas APIP (IACM) dan memperoleh nilai 2 (dalam proses menuju 3 dengan adanya kegiatan telaah sejawat, Audit Kinerja, PKPT berbasis Risiko, konsultasi) - Kebijakan pedoman penilaian risiko di lingkungan Ombudsman RI	- Telah terdapat penanganan WBS berdasarkan Peraturan Ombudsman No. 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (WBS) yang menunjuk Unit Kerja Pengelola Pengawasan sebagai pengelola WBS - Telah disusun SOP Penanganan Pengaduan Internal (WBS) di lingkungan Ombudsman RI - Telah dibangun mekanisme pelaporan WBS melalui <i>website</i> Ombudsman dan sedang dibangun aplikasi SIDUMA mengadopsi mekanisme pelaporan WBS (WISE) dari Kemenkeu - Telah dilakukan sosialisasi penerapan aplikasi SIDUMA di Kantor Perwakilan Ombudsman RI - Telah dilakukan evaluasi pengelolaan WBS sampai semester I 2019 - Telah ditambah formasi khusus untuk penanganan WBS dengan jabatan Analis Hasil Pengawasan dan Pengaduan Masyarakat - Telah dilakukan pelatihan penanganan pengaduan internal dengan metode progresif dan partisipatif (PROPARTIF) terhadap pelaksana pengelola WBS
PENERAPAN SPIP		BENTURAN KEPENTINGAN
- Telah dibentuk Satgas SPIP berdasarkan Peraturan Ombudsman No.11 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Ombudsman RI - Telah dilakukan Bimtek peningkatan maturitas SPIP dibawah binaan BPKP - Telah diperbaharui IAC Ombudsman RI yang ditandatangani oleh Ketua Ombudsman RI - Telah dilaksanakan sosialisasi SPIP bersama BPKP yang dihadiri jajaran pimpinan dan pejabat struktural di Lingkungan Ombudsman RI - Telah dilakukan penilaian mandiri maturitas SPIP dan memperoleh nilai 3,0932 (saat ini masih menunggu proses QA oleh BPKP)		- Telah disusun regulasi tentang benturan kepentingan berupa Peraturan Ombudsman tentang Kode Etik dan Kode Perilaku - Telah melakukan tindak lanjut terhadap masalah benturan kepentingan

4 DATA DUKUNG



Public Campaign Gratifikasi



Laporan Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Gratifikasi

Status Jumlah Laporan

Instansi	: Ombudsman Republik Indonesia
Jumlah Pegawai	: 117 orang
• Masih LHKASN	: 59 orang (51%)
• Sudah Lapor	: 57 orang
• Belum Lapor	: 2 orang
Jumlah Laporan	: 59
• Sudah Terverifikasi	: 59
• Belum Terverifikasi	: 0

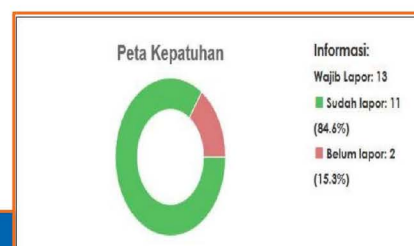
Pegawai Wajib LHKASN Yang Telah Melapor : (56 / 59 Pegawai)

Laporan Masuk Sudah Terverifikasi : (59 / 59 Laporan)

Laporan Kepatuhan LHKASN per Agustus 2019



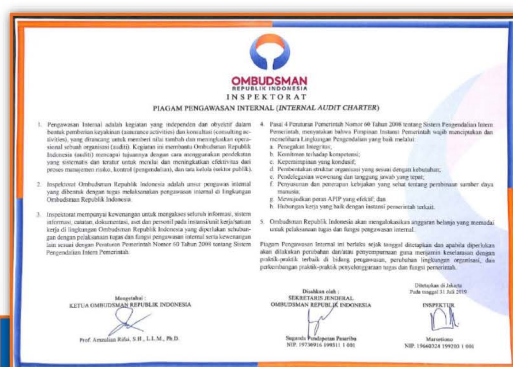
Sosialisasi LHKASN



Laporan Kepatuhan LHKPN per Agustus 2019



Penandatanganan Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)



Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)



Pedoman Penilaian Risiko

Pilih Daftar

Kategori: Daftar

Daftar: Daftar

Kategori: Rincian

TINGKAT MATURITAS SPIP TINGKAT KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMDA

Tingkat Maturitas SPIP: 3.014

Tingkat Maturitas 3 (Terdefinisi)

OPD sudah melaksanakan proses pengendalian intern dan berkoordinasi dengan baik, namun masih ada pengendalian intern dibuktikan belum dilaksanakan yang memadai.

RINCIAN TINGKAT MATURITAS SPIP PER SUBSUNUR

1. Lingkungan Pengendalian

Sub Unit: Nilai: Tingkat: Pengawasan

Penilaian Mandiri Level Maturitas SPIP (sedang Proses QA dari BPKP)



Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dengan Narasumber BPKP

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lina Maryati Siregar, S.E.
NIP : 19620323 201502 2 001
Jabatan : Analis Keuangan
Unit Kerja : Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi

menyatakan sebagai berikut:

1. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
2. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
4. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas.
5. Memberi dan/atau menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada karyawan yang berada di bawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
6. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Ombudsman RI serta ikut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya.
7. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menanggung konsekuensinya.

Jakarta, 8 April 2016

Menyatakan:
Sekretaris Jenderal,

Pembuat Pernyataan,

Lina Maryati Siregar, S.E.

Pakta Integritas



Penandatanganan Pencanangan Zona Integritas Ombudsman RI



Pencanangan Zona Integritas Ombudsman RI



Piagam Pembangunan Zona Integritas

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 31 TAHUN 2018TENTANG
UNIT KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka upaya untuk mencapai zona integritas menuju WBC;
- b. bahwa dalam rangka menjadikan unit kerja sebagai WBC;
- c. bahwa unit kerja yang ditetapkan adalah Unit Kerja Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, maka ditetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Ombudsman Republik Indonesia tentang Unit Kerja Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di lingkungan Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Penetapan Wilayah Bebas Korupsi

LAPORAN HASIL PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
(WHISTLEBLOWING SYSTEM)
DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2019

Salah satu implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) adalah laporan pengaduan masyarakat atau Whistleblowing System (WBS). Whistleblowing System adalah mekanisme pelaporan yang dapat dilakukan oleh internal atau eksternal K/L untuk melaporkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, atau peraturan lain yang berlaku, atau perbuatan menentang etika yang dilakukan oleh pejabat/pegawai K/L dengan tetap menjaga kerahasiaan dari si pelapor. Pengelolaan Whistleblowing System dilakukan oleh unit-unit atau satuan kerja yang terlibat langsung dalam struktur tata kelola pemerintahan seperti misalnya Satuan Kerja Audit Intern atau Keputuhan. Ada juga yang membuat semacam satuan tugas khusus untuk menangani Whistleblowing System yang terdiri dari satuan kerja audit intern dan sebagai unit pendukung lain yang terlibat didalamnya.

Sarana atau media komunikasi yang digunakan untuk melaporkan pengaduan ini bermacam-macam. Ada yang menggunakan media email, ada yang menggunakan hotline khusus. Ada juga yang menggunakan telepon, sms ataupun faks, bahkan sampai ada perusahaan yang secara khusus menyediakan sebuah website untuk menerima pengaduan mengenai pelanggaran.

Secara umum cara mengajukan pelaporan ada dua, yang dapat dilakukan dengan menggunakan identitas (juga dilindungi dengan foto/kei identitas), dan tanpa identitas. Pelaporan pelanggaran secara tertulis wajib dilengkapi dengan dokumen pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pelaporan pelanggaran yang akan disampaikan. Apabila dalam pelaporan pengaduan tersebut tidak menyertakan dokumen pendukung, maka perusahaan dalam hal ini petugas Whistleblowing System berhak untuk menanyakan keterangan lebih lanjut.

Secara umum, Whistleblowing System relatif terbilang baru dan belum semua K/L memiliki pengetahuan yang memadai dan komitmen untuk menerapkan Whistleblowing System ini. Akan tetapi, tujuannya yakni sebagai salah satu alat untuk melakukan pengawasan terhadap implementasi tata kelola pemerintahan di Indonesia.

Dalam rangka mendorong peran serta pejabat/pegawai di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia dan masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, telah ditetapkan Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.

Laporan Hasil Pengawasan Pengaduan Masyarakat dan WBS

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 2017

TENTANG

SISTEM PELAPORAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN INTERNAL

(WHISTLEBLOWING SYSTEM)

DI LINGKUNGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA,

- Memimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggara negara yang bebas maladministrasi di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia, perlu adanya upaya pencegahan terhadap pengaduan internal sebagai wujud penguatan integritas insan Ombudsman;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Ombudsman tentang Sistem Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Internal (Whistleblowing System) di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3852);

Sistem Pelaporan dan Penanganan Pengaduan Masyarakat dan WBS



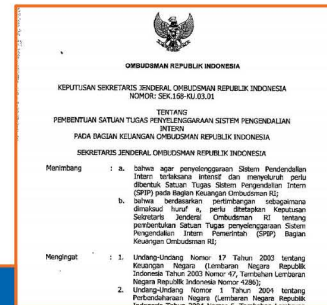
Layanan Pengaduan Masyarakat dan WBS melalui Website



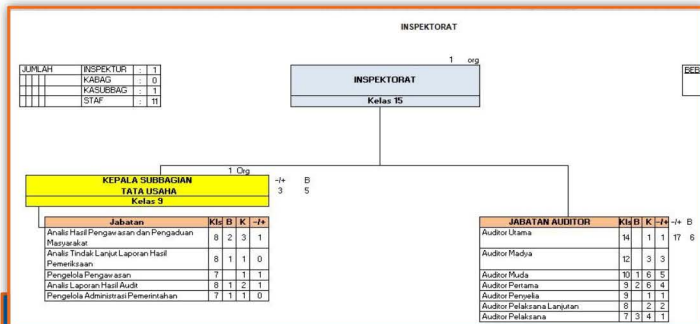
Sosialisasi Peraturan Pengaduan Masyarakat dan WBS pada Perwakilan

Pasal 90
Inspektorat terdiri atas Subbagian Tata Usaha Inspektorat dan kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Peningkatan Unit Kerja Pengawasan dari
Eselon III menjadi Eselon II



Satuan Tugas SPIT



Struktur dan Sumber Daya Manusia pada Inspektorat



Level Kapabilitas APIP
(Menuju Level 3)



CAPAIAN - PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK



1 RENCANA KERJA

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sasaran Strategis:

1. Meningkatnya kualitas dan budaya pelayanan PRIMA
2. Meningkatnya kepuasan terhadap pelayanan
3. Meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik



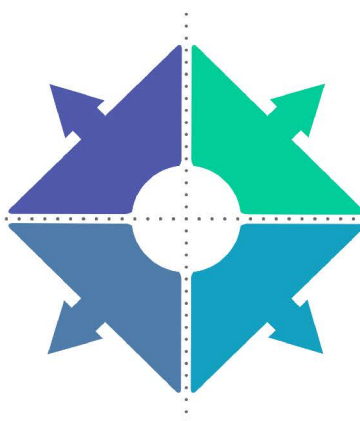
2 TIMELINE

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
NO	AKTIVITAS UTAMA	OUTPUT	WAKTU PENYELESAIAN
1	Penetapan maklumat dan standar pelayanan	Dokumen maklumat dan standar pelayanan	Maret 2019
2	Peningkatan pengelolaan pengaduan layanan Ombudsman RI	Media pengaduan kinerja dan pelayanan Ombudsman RI	Juli 2019
3	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Laporan tingkat kepuasan pelayanan	Agustus 2019
4	Pengembangan aplikasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik	- SIMPeL - AoRA - Buku tamu - ASiK - Tracking data laporan masyarakat <i>online</i> - Pemesanan ruang rapat - Pengaduan laporan pelayanan publik <i>online</i> melalui <i>website</i>	Agustus 2019

3 URAIAN CAPAIAN

BUDAYA PELAYANAN PRIMA
- Pemberian penghargaan kepada Perwakilan Ombudsman dengan persentase penyelesaian Laporan Masyarakat tertinggi - Sosialisasi Revolusi Mental

PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI
- Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan antara lain: - SIMPeL - AoRA - Buku tamu - ASiK - Media Sosial - Tracking data laporan masyarakat <i>online</i> - Pemesanan ruang rapat - pengaduan laporan pelayanan publik <i>online</i> melalui <i>website</i>



PENGELOLAAN PENGADUAN
- Telah dibuat <i>e-mail</i> ketua@ombudsman.go.id sebagai pengaduan kinerja dan pelayanan Ombudsman RI - Telah terdapat laman pada <i>website</i> Ombudsman RI terkait penyampaian pesan, kritik atau saran - Telah terdapat <i>call center</i> 137

KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN
- Keputusan Ketua Ombudsman No. 140/ORI-SK/VI/2018 tentang Standar Pelayanan Penanganan Laporan/Pengaduan Masyarakat Terkait Pelayanan Publik di lingkungan Ombudsman RI pada jenis pelayanan penyelesaian laporan/pengaduan masyarakat. - Maklumat standar pelayanan telah ditandatangani oleh Ketua Ombudsman dan sudah dipasang di setiap lantai - Peraturan Ombudsman No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan - Surat Keputusan Ketua Ombudsman No. 69 Tahun 2019 tentang Penerimaan Tamu Pelapor

4 DATA DUKUNG



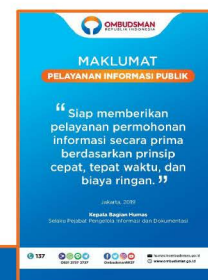
**Standar Pelayanan
Penanganan Laporan/Pengaduan**



**Pedoman Penerimaan
Tamu Pelapor dan Telepon**



Standar Pelayanan Ombudsman RI



**Maklumat Pelayanan Informasi
Publik pada Website**



**Penyerahan Piagam Apresiasi Kinerja
Penyelesaian Laporan Berbasis
Target Rencana Kerja Pemerintah**



Pojok Baca pada Perwakilan Ombudsman



Absen Apel menggunakan Scan Barcode



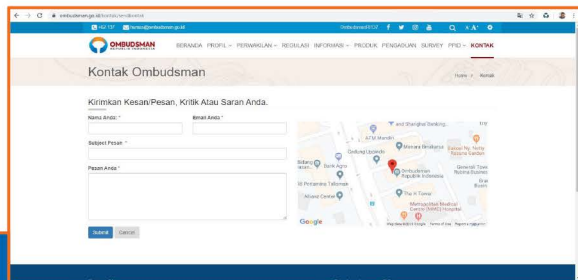
Sosialisasi Revolusi Mental



**Penerimaan dan Verifikasi Laporan Masyarakat
On The Spot**



Agenda Ombudsman RI



Laman Pesan, Kritik atau Saran pada Website Ombudsman RI



Survei Kepuasan Pelapor Ombudsman RI



Pengaduan Kinerja dan Pelayanan Ombudsman RI



Call Center 137



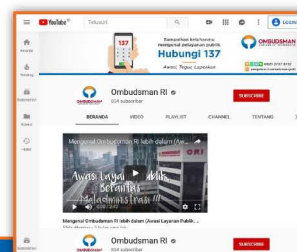
Kegiatan Ngopi Barong Ombudsman dan Bedah "Buku Terima Kasih Ombudsman"



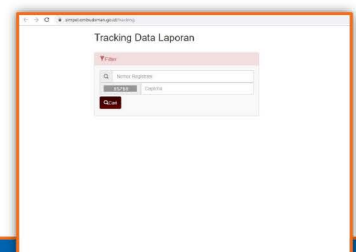
Twitter Ombudsman RI



Instagram Ombudsman RI



Channel Youtube Ombudsman RI



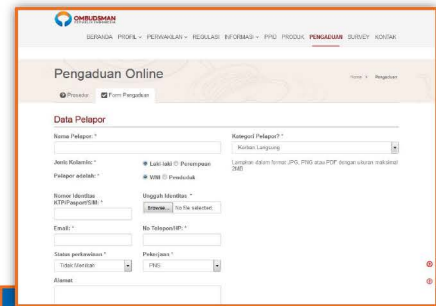
Tracking Data Laporan Masyarakat Online



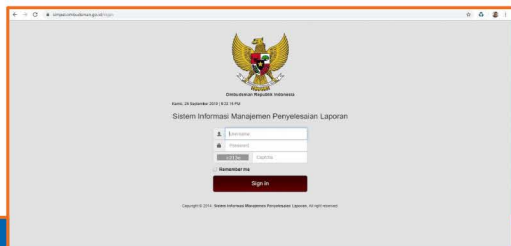
Facebook Ombudsman RI



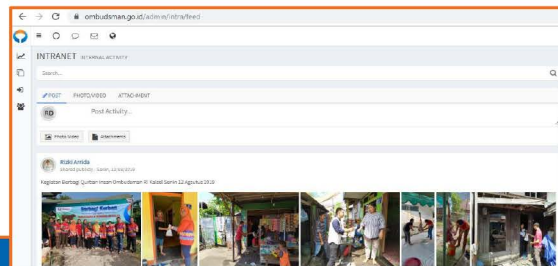
Aplikasi Buku Tamu



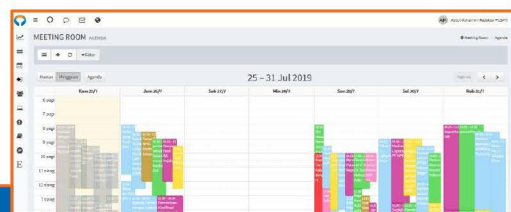
Pengaduan Laporan Pelayanan Publik Online Melalui Website



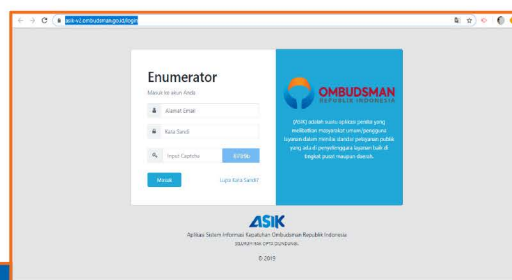
Aplikasi SIMPeL



Internal Activity



Pemesanan Ruang Rapat

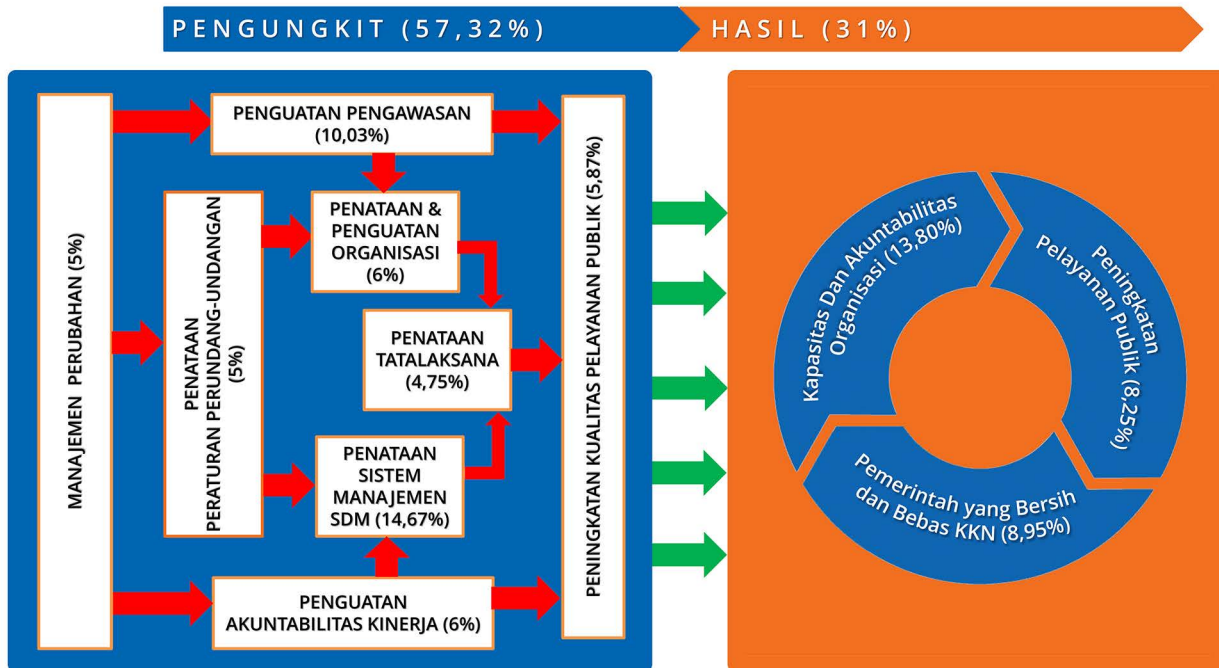


Aplikasi ASiK

III

KESIMPULAN PROFIL REFORMASI BIROKRASI DAN PERBAIKAN BERKELANJUTAN PER AREA PERUBAHAN

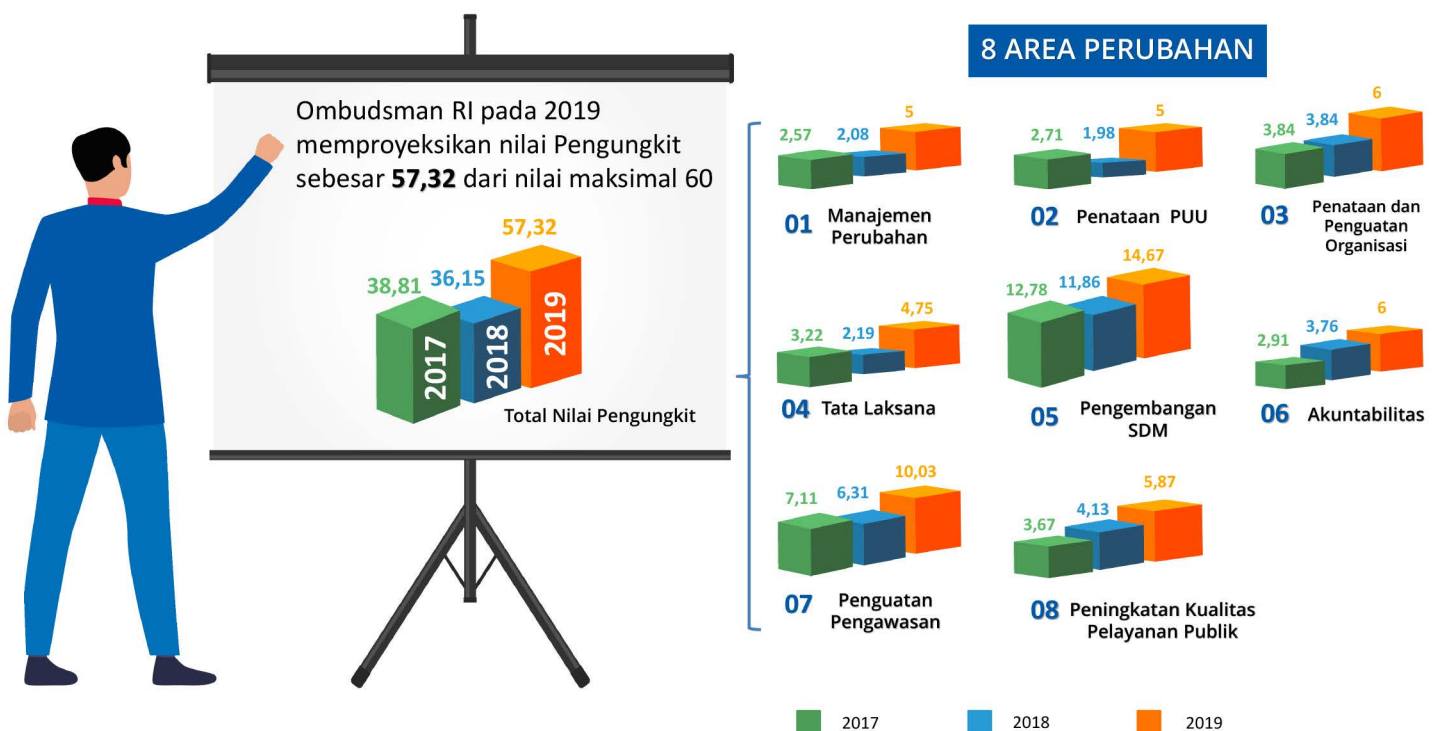
A KESIMPULAN HASIL PENILAIAN MANDIRI



HASIL PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 88,32%

Ombudsman RI memproyeksikan nilai Reformasi Birokrasi pada 2019 sebesar 88,32% terdiri atas 57,32% komponen pengungkit dan 31% komponen hasil Reformasi Birokrasi

B PROFILING RB KOMPONEN PENGUNGKIT



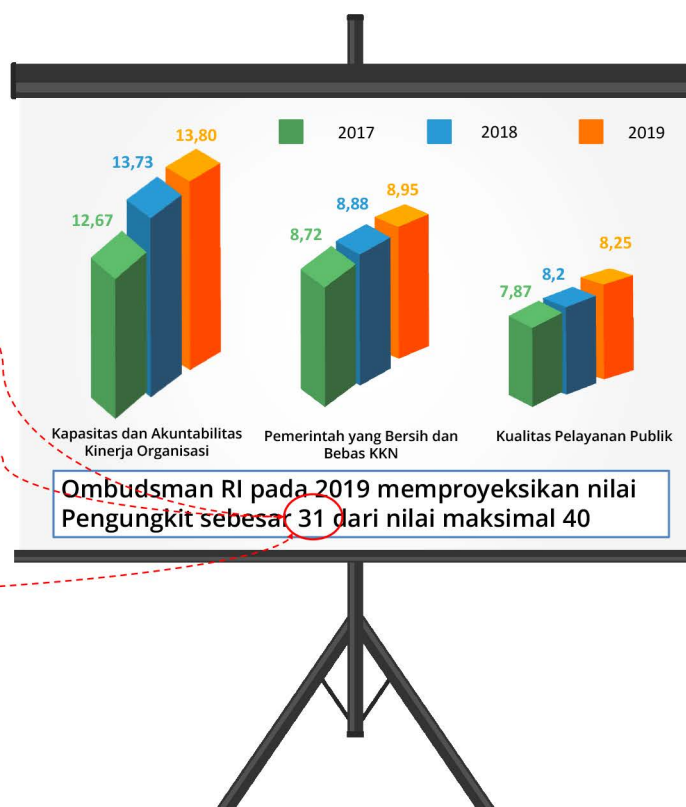


KEMAJUAN



PROFILING RB KOMPONEN HASIL

I.	Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	13,80	Keterangan
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	9,66	Mendapat Nilai B (60)
2.	Nilai Kapasitas Organisasi	4,14	Survei Internal
II.	Pemerintah yang Bersih Dan Bebas KKN	8,95	Keterangan
1.	Nilai Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	5,95	Mendapat Nilai (75)
2.	Opini BPK	3,00	WTP
III.	Kualitas Pelayanan Publik	8,25	Keterangan
1.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan	8,25	Survei Eksternal



IV

KESIMPULAN TINDAK LANJUT EVALUASI REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2018

A SARAN PERBAIKAN BERDASARKAN SURAT KEMENPANRB NO. B200/M.RB.06/2018 TANGGAL 31 DESEMBER 2018

NO	SARAN PERBAIKAN	TINDAK LANJUT
1	Melakukan reuiu atas <i>Road Map</i> reformasi birokrasi Ombudsman RI dengan menetapkan prioritas perbaikan yang perlu dilakukan baik di level pusat maupun pada level unit kerja.	1. <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah di reuiu dengan melibatkan seluruh unit kerja pada Sekretariat Jenderal Ombudsman RI. 2. Reuiu <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah di sosialisasikan 3. Dokumen reuiu <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 telah dipublikasi melalui <i>e-mail</i>/Internal Ombudsman kepada seluruh Pegawai
2	Secara berjenjang menginternalisasi arah perubahan yang dicanangkan di Ombudsman RI kepada seluruh pegawai di seluruh satuan agar memahami arah perubahan tersebut dan dilibatkan dalam proses perubahan.	Reuiu <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi 2015-2019 dan Nilai-nilai Budaya Kerja SOLUSI (Sopan, Lugas, Sigap) telah di Sosialisasikan dan dilakukan Sharing Knowledge pada tanggal 2 dan 9 Agustus 2019 di Ruang Serbaguna Lantai Dasar yang dihadiri oleh seluruh Pegawai Negeri Sipil.
3	Melakukan penilaian kinerja individu secara berkala sebagai dasar pemberian <i>reward dan punishment</i> sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden No. 121 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia.	Dalam rangka melakukan penilaian kinerja individu, telah dibuat aplikasi E-Kinerja yang dikembangkan oleh Bagian Kepegawaian dan Bagian Teknologi Informasi.
4	Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas implementasi sistem pengawasan internal untuk memastikan efektivitas dari sistem tersebut.	Dalam rangka meningkatkan kesadaran ber SPI di lingkungan Ombudsman RI, Inspektorat telah melaksanakan kegiatan: 1. Penguatan peran APIP melalui penandatanganan Piagam Pengawasan Internal 2. Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh BPKP dalam rangka mempersiapkan unit kerja dalam menyelenggarakan SPI di masing-masing unit kerjanya.
5	Melakukan optimalisasi pembangunan Zona Integritas sebagai unit kerja miniature reformasi birokrasi dengan mengacu pada PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.	Sesuai PermenPANRB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Zona Integritas WBK/WBBM Ombudsman RI telah : 1. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No.98 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas 2. Menetapkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal No.109 Tahun 2019 tentang Tim Penilai internal Pembangunan Zona Integritas
6	Meningkatkan kapasitas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) agar tidak semata-mata hanya berfungsi sebagai penilai saja.	Telah dilakukan peningkatan kapasitas Tim Asessor di Ombudsman RI melalui: 1. <i>Benchmarking</i> pelaksanaan PMPRB di Mahkamah Konstitusi 2. <i>Benchmarking</i> pelaksanaan PMPRB di Lembaga Administrasi Negara 3. Sosialisasi Pemahaman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB 2.5) dengan menghadirkan Narasumber dari KemenPANRB.

B REUIU ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2015-2019 DAN SOSIALISASI



Pembahasan Reuiu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019



Sosialisasi Reuiu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019



Reuiu *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019



Pembahasan Reuiu *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019



NILAI-NILAI BUDAYA KERJA SOLUSI (SOPAN, LUGAS, SIGAP)



Sharing Knowledge Budaya SOLUSI



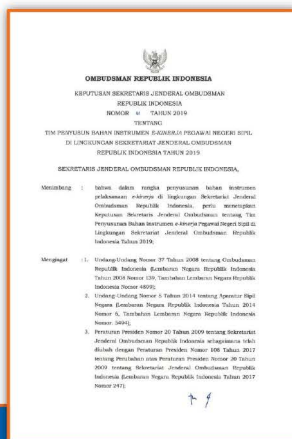
Yel-Yel Budaya Kerja SOLUSI sebagai Ciri Khas, Penyemangat dan Kebersamaan yang Terungkap dalam Kata dan Gerak



Peningkatan Budaya Kerja PRIMA dan SOLUSI



APLIKASI E-KINERJA SEBAGAI DASAR PEMBERIAN REWARD DAN PUNISHMENT



Keputusan Sekjen No. 40 Tahun 2019 tentang Tim Penyusunan Bahan Instrumen E-Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jendral Ombudsman



Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja kepada Seluruh PNS



Sosialisasi Aplikasi E-Kinerja pada saat Rapat Kerja Nasional 2019



Aplikasi E-Kinerja



Konsinyering Tim Penyusun Bahan Instrumen E-Kinerja



Draft Peraturan tentang Penilaian Kinerja



PELAKSANAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH



Penandatanganan Piagam Pengawasan Internal
(Internal Audit Charter)



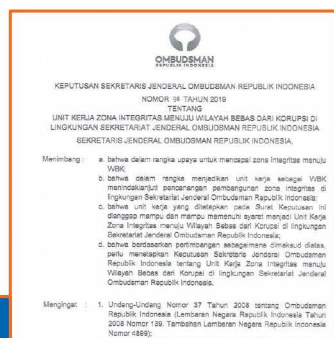
Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter)



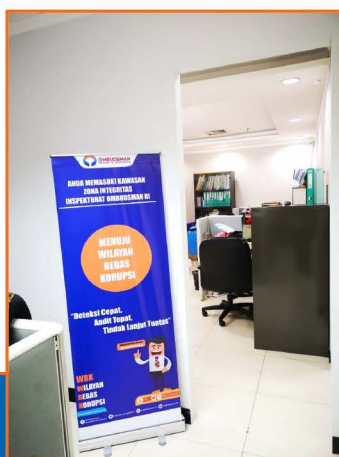
Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah oleh BPKP



OPTIMALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



Penetapan Wilayah Bebas Korupsi



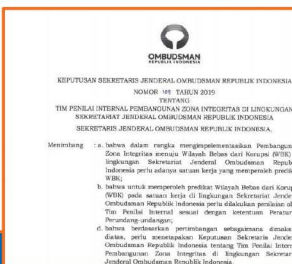
Banner Wilayah Bebas Korupsi

NO	AREA PERUBAHAN ZI	NILAI
1	Manajemen Perubahan	3.22
2	Penataan Tata Laksana	4.34
3	Penataan Sistem Manajemen SDM	11.91
4	Penguatan Akuntabilitas	9.48
5	Penguatan Pengawasan	11.78
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	8.07
TOTAL		48.79

NO.	INDIKATOR HASIL	NILAI
I.	Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN	14.25
II.	Kualitas Pelayanan Publik	15.00
TOTAL		29.25

Inspektorat Ombudsman RI, sebagai unit kerja miniatur reformasi birokrasi memperkirakan total nilai evaluasi Zona Integritas sebesar 78,04

Nilai Hasil Zona Integritas



Tim Penilai Pembangunan Zona Integritas



PENINGKATAN KAPASITAS TIM ASESSOR DAN PEMAHAMAN PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI



Benchmarking ke Mahkamah Konstitusi



Sosialisasi Percepatan Pelaksanaan PMPRB



Benchmarking ke Lembaga Administrasi Negara



Sosialisasi PMPRB 2.5 dengan Narasumber dari KemenPANRB



TERIMA KASIH